

## BAB IV

### POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA SUSILO BAMBANG

#### YUDHOYONO

##### A. Demokrasi dan Politik luar Negeri Indonesia

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Kepentingan nasional dapat dicapai dalam wilayah negara itu sendiri dan dapat pula dicapai di luar wilayah negara. Dalam hal pencapaian kepentingan nasional dilakukan di luar batas wilayah negara, instrument yang digunakan ialah Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri merupakan refleksi dari kondisi dalam negeri dan pada saat yang sama dipengaruhi oleh perubahan – perubahan dinamis dari lingkungan regional dan internasional. Hal ini juga terlihat jelas pada implementasi Politik Luar Negeri Republik Indonesia (PLNRI) yang tampak memiliki karakteristik dan gaya berbeda – beda di tiap – tiap periode pemerintahan. Periode Orde Lama PLNRI memiliki karakteristik berhubungan akrab dengan kubu negara – negara komunis, serta bergaya *Konfrontatif*. Periode Orde Baru PLNRI memiliki karakteristik berhubungan karib dengan kubu negara - negara Barat serta bergaya *Low Profile-Kooperatif*. Sedangkan pada periode Orde Reformasi PLNRI memiliki karakteristik berkawan dengan semua negara serta bergaya *Aktif-Diplomatis*.

Tumbangnya Orde Baru digantikan dengan Orde Reformasi, pada era ini ada dua kabinet yaitu : Pertama adalah Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang mengoperasionalkan PLNRI melalui Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 yang menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU no.37 tahun 1999 tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, UU No.24 tentang Perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, dan perubahan UUD 1945 pada beberapa pasal, khusus untuk hubungan luar negeri perubahan ada pada pasal 13 . Kabinet kedua adalah Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2014). Kabinet ini meletakkan landasan operasional PLNRI pada tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2004 - 2009 yang isinya:<sup>59</sup>

1. Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional.
2. Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional,

---

<sup>59</sup> Reni Windiani, Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi, hal 1-3  
<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>

terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai *concentric circle* utama politik luar negeri Indonesia.

3. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimana dituangkan dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945.

Masa pemerintahan SBY pertama yaitu Pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid I (Era SBY- JK) = (2004-2009). Kemunculan Orde Reformasi masih tetap mewarisi kondisi ekonomi yang buruk akibat krisis ekonomi yang terjadi pada 1997- 1998. Prioritas lainnya yaitu pemulihan citra Indonesia dimata internasional. Upaya untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia di dunia Internasional dilaksanakan melalui diplomasi. Diplomasi Indonesia yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) turut mengaktualisasikan program dan prioritas Kabinet Indonesia Bersatu yang pada intinya adalah melakukan diplomasi total untuk ikut mewujudkan Indonesia yang bersatu, lebih aman dan damai, adil, demokratis dan sejahtera.

Kepentingan nasional Indonesia diterjemahkan kedalam visi Departemen luar negeri yang disebut sebagai “Sapta Dharma Caraka”, yaitu: (1) Memelihara dan meningkatkan dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia; (2) membantu pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan dan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi; (3) meningkatkan peranan dan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN, peran aktif di Asia-Pasifik, membangun kemitraan strategis baru Asia-Afrika serta hubungan antar sesama negara berkembang; (4) memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatkan prakarsa dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian keamanan dan perdamaian internasional serta memperkuat multilateralisme; (5) meningkatkan citra Indonesia di masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hal asasi manusia, dan memajukan perdamaian dunia; (6) meningkatkan pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri serta melancarkan diplomasi kemanusiaan guna mendukung tanggap darurat dan rekontruksi Aceh dan Nias dari bencana gempa dan tsunami; (7) melanjutkan benah diri untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, budaya kerja dan profesionalisme pelaku diplomasi serta peranan utama dalam koordinasi penyelenggaraan kebijakan dan hubungan luar negeri.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Moenir Ari Soenanda, *Kepentingan Nasional Indonesia di Dunia Internasional*,

Untuk mencapai kepentingan nasional, sebuah negara harus memiliki politik luar negeri. Oleh karena itu politik luar negeri yang dianut setiap negara terhadap negara lain berbeda- beda sesuai dengan kepentingan nasional masing- masing. Saat ini lingkungan internasional sedang menghadapi isu-isu seperti demokrasi, HAM, lingkungan hidup, ketahanan pangan dan krisis energi. Pendekatan politik luar negeri yang dilakukan pada era Presiden SBY memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. *Opportunity Driven*, yaitu mendayagunakan segala kesempatan yang ada secara optimal.
2. *Win Win Solution*, yaitu memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
3. *Constructive*, yaitu bahwa Indonesia akan berperan dalam kegiatan- kegiatan yang mendorong terciptanya kestabilan regional.
4. Rasional dan Pragmatis, yaitu menggunakan rasio dalam berpikir dan pertimbangan keputusan serta berpikir secara pragmatis atau manfaat.
5. *Soft Power*, yaitu mengandalkan dan mempelajari cara- cara halus dalam melakukan diplomasi seperti yang dilakukan di negara- negara Canada, Norwegia dan Australia.

6. Personal, yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap pemimpin tiap- tiap negara untuk mengamil hati dan menjalin persahabatan.

Dengan pendekatan yang dianut tersebut, maka Presiden SBY menerapkan politik luar negeri yang konstruktif untuk membangun stabilitas nasional dan internasional dengan membawa semboyan *All Directions Foreign Policy* (Politik luar negeri ke segala arah). Hal ini berarti bahwa Indonesia tidak hanya memihak ke satu pihak saja, sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Selain itu, Indonesia juga menganut paham *A Million Friends, Zero Enemy* yang artinya merangkul sebanyak- banyaknya kawan dengan menggunakan soft power sehingga meminimalisir kemungkinan adanya musuh. Di dalam ASEAN , Indonesia secara khusus menerapkan prinsip tersebut yang di dorong oleh kepentingan nasional Indonesia.<sup>61</sup>

Mengimplementasi konsep *thousand friend zero enemy* tidak terlepas dari diplomasi itu sendiri karena kedua faktor ini sangat berkaitan erat yang dipandang dari sudut politik luar negeri bebas aktif. Membahas tentang konsep thousand friend zero enemies tentu saja kita mengamati bagaimana kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Indonesia yang lebih mengarah kepada soft diplomasi di

---

<sup>61</sup>Yarnis Sikumbang, *Politiki Luar Negeri Indonesia terhadap ASEAN*, hal. 5, [http://www.academia.edu/3725620/Politiki\\_Luar\\_Negeri\\_Indonesia\\_terhadap\\_ASEAN](http://www.academia.edu/3725620/Politiki_Luar_Negeri_Indonesia_terhadap_ASEAN) (diakses 27 Januari 2015)

banding hard diplomasinya. Saat ini konsep-konsep politik bebas aktif ini diibaratkan seperti mendayung diantara banyak karang.

Thousand friend zero enemies diimplementasikan sebagai upaya untuk menjaga reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Karena sebuah sikap berpihak berpotensi membahayakan reputasi pemerintah. Sehingga pemerintah memerlukan sosialisasi bahwa pemerintah bersikap netral. Pemilihan pemerintah dalam sebuah pencitraan bukan berarti tanpa resiko karena segala sesuatu bergerak secara bersamaan dalam pemerintahan Indonesia.

Berangsur-angsur Indonesia mengalami transisi kearah citra yang lebih baik dimata internasional. Dengan kata lain citra positif tersebut sangat di pengaruhi oleh peran Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Preiden Republik Indonesia, salah satu buktinya yaitu terlihatnya Indonesia dalam G-20. Sedangkan dalam kancan regional Asia Tenggara, Indonesia di daulat sebagai tuan rumah ASEAN di tahun 2010. Bahkan presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi sempat menjadi salah satu kandidat peraih nobel perdamaian, serta yang terbaru yang diwacanakan sebagai kandidiat Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Lihat Zihad Falahi, Memikirkan kembali arti million friend zero enemy dalam era paradox of plenty, hal.229,<http://journal.unair.ac.id/filerPDF/10%20Ziyad%20Falahi%20-%20Memikirkan%20Kembali%20Arti%20Million%20Friends%20Zero%20Enemy%20dalam%20Era%20Paradox%20of%20Plenty%20%281%29.pdf>

Salah satu bentuk implementasi dari konsep *thousand friend zero enemies* ini adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan banyak negara. Dengan kata lain, Indonesia sekarang ini sesungguhnya sedang menjadi negara netral yang di tunjukan dengan sikap tidak menggunakan idiom teman dan musuh dalam berdiplomasi karena sama saja dengan keberpihakan. Dalam hubungan Internasional, teman atau musuh merupakan istilah yang problematic. Maka berteman dengan suatu pihak merupakan musuh bagi pihak lain. Bahkan hubungan pertemanan tidaklah permanen karena negara atau aktor internasional bukanlah suatu institusi yang statis. Setiap perubahan dapat merubah persepsi setiap aktor terhadap aktor lainnya. Dengan demikian, banyak sekali variabel yang berpotensi adanya perubahan status teman menjadi musuh atau sebaliknya.

Salah satu contoh bentuk dari konsep yang di keluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut adalah dengan memberikan grasi kepada WNA yaitu pada kasus Corby , warga negara Australia yang membawa ganja 4,2 kg ke Bali, grasi tersebut di berikan agar WNI di Australia bisa memperoleh hal yang sama, presiden juga beranggapan bahwa dengan memberikan grasi tersebut dapat menjaga kepercayaan antara negara Indonesia dan Australia dan apabila kepercayaan ini telah tercipta maka daapat dilakukannya kerja sama dalam bidang apapun baik itu ekonomi, politik, keamanan dalam lain-lain.

Tidak hanya dengan negara Australia saja, Indonesia membuat kebijakan agar *thousand friend zero enemies* ini dapat diimplementasikan secara optimal



tetapi kepada negara lain pula agar diharapkan setelahnya muncul kepercayaan sehingga dapat melakukan kerjasama yang berujung untuk mensejahterakan negara masing-masing.

Selain itu Indonesia juga menerapkan *dynamic equilibrium*. Istilah keseimbangan dinamis (dynamic equilibrium) berangkat dari sudut pandang politik luar negeri bebas aktif. Dynamic equilibrium memiliki kecenderungan untuk membangun kawasan yang stabil, dan damai. Dynamic equilibrium ini memiliki dimensi-dimensi bagi kepentingan ekonomi Indonesia yang dapat sangat menguntungkan Indonesia apabila dirumuskan pada pembuatan kebijakan luar negeri yang lebih konkrit. Indonesia juga telah menahan diri dari memihak antara Amerika Serikat dan China meskipun meningkatnya ketegangan sekarang di sekitar wilayah Laut China Selatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya ketegangan regional secara langsung, Indonesia telah memilih untuk "bebas dan aktif", dan lebih memilih "kekuatan menengah" melalui serangkaian kemitraan strategis atau komprehensif.<sup>63</sup>

Pada tataran kawasan yang lebih luas, Indonesia kembali menunjukkan *intellectual leadershipnya* dalam perdebatan tentang *regional architecture building*, untuk menciptakan kawasan Asia Pasifik yang lebih stabil, damai dan sejahtera berdasarkan pada dynamic equilibrium, dimana ASEAN terus

---

<sup>63</sup>Lihat Susilo Bambang Yudhoyono, "SBY Pidato Pelantikan: Text" *Jakarta Globe*(20 Oktober 2009), dikutip dalam <http://www.thejakartaglobe.com/archive/sbys-inaugural-speech-the-text/> (diakses 11 Maret 2013)

memainkan peran utama. Hal ini terjabarkan antara lain melalui perluasan keanggotaan East Asia Summit dengan di terimanya AS dan Rusia secara bersamaan<sup>64</sup>.

Beberapa hal yang penting mengapa dinamic equilibrium penting diterapkan seperti, pertama, regionalisme dikawasan Asia pasifik memiliki banyak bentuk selain ASEAN yang menjadi pilar utama kerjasama regional, sehingga penguatan terhadap ASEAN itu sendiri dirasa sangat diperlukan untuk mengembangkan ASEAN itu sendiri. Kedua, pencapaian kepentingan nasional itu sendiri serangkali menjadi sumber konflik, oleh karena itu di harapkan tidak ada kekuatan dominan tunggal didalam kawasan dan berbagai negara di kawasan regional sehingga dapat berinteraksi secara damai dan bersifat mutualisme. Ketiga, dinamic equilibrium dijadikan sebagai bagian dan antisipasi dinamika perubahan global yang secara ekonomi mengalami pengunduran berkepanjangan, dan secara politik telah merubah tatanan dan persepsi global.

Keempat, perubahan pandangan dan pendekatan yang berbeda dianggap mampu menyelesaikan hubungan-hubungan yang tadinya menjadi sumber instabilitas sekarang bergerak sebaliknya yakni mencari pijakan baru tanpa menuju kepada sebuah konflik terbuka. Kelima, merupakan kerangka kerjasama yang strategis yang mempengaruhi berbagai kepentingan dan kekuatan dominan.

---

<sup>64</sup>Lihat e-Book Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia "*Diplomasi Indonesia 2010*", <http://www.kemlu.go.id/Books/Buku%20Diplomasi%20Indonesia%202010.pdf>, hal.i (RingkasanEksekutif diakses 29 Januari 2015)

Keenam, konsep ketergantungan dan keterpaduan yang saling menguntungkan pembangunan dan perkembangan negara-negara ASEAN. Ketujuh, merupakan perwujudan menyeluruh yang mengarihi hegemonisme. Kedelapan, landasan penting membedakan kebangkitan negara-negara ASEAN berdasarkan asas kesetaraan dan menjadikan kemajemukan menjadi total integrasi baru menghadapi persoalan global. Kesembilan, sebagai upaya global melakukan komersialisasi ekonomidan perdagangan internasionalisasi sebagai kesejahteraan bersama. Beberapa faktor tersebut dianggap sebagai alasan mengapa dynamic equilibrium sangat tepat diterapkan untuk kawasan regional.

## **B. Perkembangan Hubungan Indonesia-Israel Dalam Lingkup Ekonomi**

Dalam hal perdagangan, Israel mendapatkan surplus di dalam neraca berjalan. Israel dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan trend surplus dalam neraca berjalannya. Terutama setelah berkontraksi setelah krisis finansial global, ekspor Israel terus menunjukkan peningkatan. Namun, jika diklasifikasikan kembali neraca berjalannya, ekspor barang-barang dari Israel lebih sedikit daripada impor barang-barang dari luar Israel. Pada tahun 2010 Israel mengalami defisit dari perdagangan barang-barang. Perhitungan tersebut belum memperhitungkan impor bahan bakar yang angkanya mencapai 10.448 juta NIS pada tahun 2010. Selain itu jumlah wisatawan yang datang ke Israel lebih sedikit dari warga Israel yang berkunjung ke luar negeri. Surplusnya neraca berjalan

Israel lebih disebabkan oleh ekspor dari jasa-jasa dan berlian yang mencapai 47.984 juta NIS pada tahun 2010.<sup>65</sup>

Dalam *financial account*, Israel dihadapkan dengan lebih besarnya *capital inflow* dan FDI yang ada di Israel ketimbang *capital outflow* dan FDI perusahaan Israel di luar. Kondisi ini merefleksikan bahwa pemodal asing sangat percaya dengan kondisi fudamenatal perekonomian Israel dan tidak terlalu khawatir dengan *political risk* yang terjadi di Israel. Namun, dalam tiga tahun belakangan ini, FDI Israel di luar negeri angkanya terus meningkat seiring dengan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional Israel.

Selain itu yang menjadi nilai lebih dari ekonomi Israel adalah perekonomian Israel dibangun oleh teknologi dan inovasi dari industri-industri yang ada di Israel. Lain hal dengan sebagian negara maju lainnya yang mengandalkan *booming* pada sektor keuangan dan properti dalam menggenjot perekonomiannya. Dalam teori Robert Solow mengenai pertumbuhan menjelaskan bahwa peningkatan investasi secara permanen hanya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara temporer, tidak dengan peningkatan kemajuan teknologi yang membuat pertumbuhan ekonomi secara riil.

Ekonomi Israel umumnya ditopang oleh beberapa sektor diantaranya adalah sektor agrikultur, keuangan, energi dan industri dengan teknologi tinggi.

Menelusuri perselingkuhan gelap antara pemerintah Indonesia-Israel bukanlah hal yang mudah. Agustus 2009, santer terdengar bahwa Israel membuka

---

<sup>65</sup> [http://indolink.co.il/Articles/z\\_article\\_26\\_i.html](http://indolink.co.il/Articles/z_article_26_i.html) (diakses 14 oktoberr 2013)

kantor dagangnya di Indonesia. Kendati tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, hubungan dagang bisa diteruskan dan dikelola dengan baik. Orah Korn, koresponden pada desk ekonomi di harian Dza Marker berbahasa Ibrani yang terbit di Israel, menulis laporan, Israel tengah berupaya memperluas jaringan dan hubungan ekonominya dengan negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Tujuan dibukanya kantor dagang Israel di Jakarta sendiri, demikian Korn, adalah untuk memulai babak baru hubungan ekonomi antara Israel dan Indonesia. Ternyata, sebelum kantor dagang Israel itu dibuka di Jakarta, hubungan "gelap dan diam-diam" antara Indonesia dan Israel telah berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh Ran Kohin, kepala kantor dagang Israel-Asia. Kohin menegaskan, dibukanya kantor dagang Israel di Jakarta merupakan hasil dari perkembangan yang baik dalam hubungan ekonomi antara Indonesia dan Israel yang telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, meskipun tak ada hubungan diplomatik antara keduanya.

Pemerintahan Gus Dur, tahun 1999, telah merencanakan untuk membuka kembali hubungan perdagangan dengan negeri penjajah itu, yang telah terputus sejak tahun 1967. Rencana itu pun diwujudkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut Binsar Pandjaitan pada tahun 2001. Menteri ini menandatangani Surat Keputusan Menperindag No.23/MPP/01/2001 tertanggal 10 Januari 2001 yang melegalkan hubungan dagang antara RI dengan Zionis-Israel.

Dari Gus Dur, berlanjut ke masa pemerintahan SBY. Pada 13 September 2005, Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha bertemu dengan Menlu Israel, Silvan Shalom, di New York, AS. Hassan mengaku pertemuan itu tidak membahas pemulihan hubungan diplomatik. “Kami tidak bicara masalah hubungan diplomatik. Israel sangat tahu posisi Indonesia seperti apa,” katanya. Saat itu pemberitaan di sejumlah media massa asing ramai menyiarkan keinginan Israel untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Menurut media asing itu, Jerusalem (Israel) telah mengirimkan surat tentang hal itu kepada Jakarta. SBY menolak fakta tersebut. “Tidak ada yang gelap, karena, sekali lagi, kita ingin membantu perjuangan bangsa dan rakyat Palestina,” ujar SBY di kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York waktu itu.<sup>66</sup>

Tahun 2006, sebuah misi dagang Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) berkunjung ke Israel. Saat itu Ketua Kadin Indonesia Mohammad Hidayat menandatangani perjanjian ekonomi kedua negara. “Indonesia bisa menjadi pasar utama bagi ekspor barang-barang Israel ke Asia Tenggara,” kata Presiden Israel Manufacturers Association, Shraga Brosh dalam acara itu. Sedangkan Hidayat mengatakan kerja sama ini bisa membantu perusahaan-perusahaan Israel untuk melakukan kegiatan di Indonesia. Kunjungan ini sekaligus menegaskan bahwa telah terjalin kontak yang intensif antara kedua negara di sektor perdagangan. Lihat saja data volume perdagangan Indonesia-Israel selama tahun 2005 mencapai 154 juta dolar. Dari nilai ini, Israel hanya

---

<sup>66</sup> [http://indolink.co.il/about\\_i.html](http://indolink.co.il/about_i.html) (diakses 14 Oktober 2013)

mengekspor 14 juta dolar, sedang Indonesia mengekspor 140 juta dolar ke Israel terutama, terutama untuk barang elektronika, plastik, dan karet. Negara Zionis itu menargetkan volume perdagangan kedua negara bakal mencapai 600 juta dolar di tahun 2010.<sup>67</sup>

Zionis mengincar berbagai proyek penting di Indonesia misalnya proyek pembangunan PLT-Geothermal di Sumatera senilai 200 juta dolar yang dimenangkan oleh Ormat Technology, perusahaan engineering Israel di bidang energi geothermal. Selain itu, Indonesia menjadi sasaran pemasaran produk-produk teknologi biomedik. Di bidang medis, hubungan Indonesia-Israel terjalin mesra dengan banyaknya peralatan ICU (Intensive Care Unit) yang ada di rumah-rumah sakit besar di negeri ini yang dibeli dari Israel. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan tenaga-tenaga medis Indonesia ke sana untuk pelatihan ICU. Rumah-rumah sakit besar yang ada di Indonesia, terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, sudah lazim mengirim tenaga-tenaga medisnya untuk mendapat pelatihan ICU di Israel. Sangat besar kebijakan ke depan masih akan terus berjalan mengingat Menteri Kesehatan baru dijabat mantan pejabat Namru yang misterius.

Hubungan Israel-Indonesia memiliki hubungan yang sangat strategis. Menurut Kohin, Israel melihat adanya peluang serta potensi pasar dagang dan ekonomi yang begitu besar di Indonesia. Indonesia dipandang sebagai negara yang subur, memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, memiliki

---

<sup>67</sup> *Ibid*

wilayah yang luas (seluas benua Eropa), juga penduduk yang mencapai 200 juta jiwa. "Dengan segala potensi itu, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar," terang Kohin.<sup>68</sup>

Atas dasar itulah didirikanlah sebuah website yang menjembatani hubungan Indonesia-Israel khususnya dalam bidang perdagangan. Nama domain website tersebut adalah Indolink (<http://indolink.co.il>). Berdiri sejak tahun 2004, Indolink memiliki visi dan misi untuk membantu para pengusaha Indonesia yang ingin menjalin kerja sama strategis yang sukses dan saling menguntungkan dengan rekan usahawan Israel. Indolink memberikan dan layanan menyeluruh bagi para importir distributor Indonesia yang bekerjasama dengan suplair dari Israel mulai dari penjajakan produk, pemilihan suplair, negosiasi harga dan kondisi kerja sama hingga transaksi pembelian dan perjanjian distribusi.

Di dalam website Indolink, juga dijelaskan beberapa kebiasaan yang terjadi dalam hubungan bisnis Israel yang diterima. Dijelaskan, bangsa Israel memiliki mentalitas yang dikenal dengan istilah "tzabarim" (asli Israel) yang dapat dipahami hanya oleh orang-orang yang tinggal di Israel. Keberhasilan hubungan bisnis dengan orang Israel tergantung pada pemahaman atas mentalitas *tzabarim*, suatu faktor yang jauh lebih penting daripada faktor objektif kecocokan produk, harga dan solusi birokrasi ekspor-impor. Indolink sendiri, berdiri sejak tahun 2004 yang ditujukan sebagai solusi atas berbagai kendala yang dihadapi oleh para usahawan Indonesia dalam memanfaatkan peluang bisnis dengan Israel.

---

<sup>68</sup> *Ibid*



Meski baru 5 tahun usianya, Indolink telah mencatat sejumlah keberhasilan mensukseskan hubungan bisnis antara para usahawan dan organisasi bisnis Indonesia dengan para rekanan Israel.

Indolink bisa terbilang memberikan layanan yang lengkap. Tercatat, service yang disiapkan Indolink sebagai berikut:

1. Penjajakan produk sesuai spesifikasi yang diminta,
2. Identifikasi dan koneksi dengan para suplair potensial,
3. Pemilihan suplair yang tepat,
4. Negosiasi harga dan kondisi kerjasama,
5. Transaksi pembelian,
6. Perjanjian distribusi,
7. Solusi birokrasi ekspor-impor,
8. Solusi komunikasi guna menghindari dan mengatasi kesalahpahaman,
9. Memfasilitasi kunjungan ke pabrik suplair di Israel (visa, dll.)
10. Mempererat hubungan dengan pihak suplair guna terjalinnya kerja sama jangka panjang.<sup>69</sup>

Perusahaan yang memiliki alamat pusat di Zamir Building 22A Raul Wallenberg St. Ramat Hahayal, Tel-Aviv 69719 ini, ternyata menyediakan jasa yang cukup komplit, antara lain, jasa penerjemahan, layanan pendampingan dengan rekanan Israel, pelatihan bahasa Ibrani dan persiapan pertemuan bisnis dengan kolega bisnis Israel, dan sebagainya. Di dalam website Indolink juga

---

<sup>69</sup> *Ibid*

terdapat informasi tentang Sampoerna Buying 20.2% of Harel dan juga penggambaran potensi Indonesia di Indonesian Medical Market.<sup>70</sup>

Salah satu hubungan yang lahir dari kebijakan politik antara Indonesia dan Israel ini adalah kerja sama antara Credit Risk Insurance Assure of Israel dan Asuransi Jasindo dari Indonesia.<sup>71</sup> Fenomena Jasindo adalah fakta betapa dalam jaringan Israel telah memasuki negeri ini. Sedangkan dua majalah nasional lainnya, Gatra dan Tempo, memuat laporan tentang tukar guling Bakrie Brothers Tbk. Dengan Vallar Plc. yang berkedudukan di London, Inggris. Majalah Gatra bahkan memuat headline di sampul depan dengan judul “Jejak Yahudi di Grup Bakrie”. Sementara itu, situs-situs berita online memuat rencana Dinasti Rothschild untuk menguasai sektor energi, terutama batu bara di Indonesia dengan berkolaborasi lewat Grup Bakrie.

Pada perkembangannya, berdasarkan data yang terdapat disitus kementerian perdagangan tercatat bahwa nilai ekspor dan impor antara Indonesia dan Israel bukan lagi sebagai kerjasama ekonomi yang kecil. Tahun 2012 misalnya nilai ekspor dan impor berdasarkan neraca perdagangan menyentuh nominal 192 juta dollar. Untuk data lebih lanjut terdapat pada table berikut :

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Herry, Nurdi, *Lobi Zionis dan Rezim Bush: Teroris Teriak Teroris*, Jakarta: Hikmah, 2006, hal. 237



Tabel diatas jelas menunjukkan bahwa pada masa Susilo Bambang Yudhoyono kerjasama perdagangan antara Indonesia – Israel bukan sekedar opini atau isu yang berkembang dimasyarakat namun merupakan fakta yang dapat dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga negara dibawah presiden. Kerjasama antara Indonesia dan Israel dalam konteks perdagangan selama ini memang dilakukan oleh pihak swasta atau melalui negara ketiga terutama Singapura. Sehingga pernyataan Tel Aviv tentang tugas ganda dari duta besar Israel untuk Singapura yang juga sebagai perwakilan Israel untuk Indonesia menjadi hal yang terbukti secara ilmiah.

### **C. Kebijakan Luar Negeri Susilo Bambang Yudhoyono**

Berdasarkan data-data yang sudah penulis paparkan sebelumnya, bisa dilihat bahwa memang ada perkembangan atau perubahan dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Israel pada era Susilo Bambang Yudhoyono terutama dalam bidang ekonomi perdagangan, diantaranya :

1. Israel merupakan rekan dalam hubungan antar negara.

Sesuai dengan prinsip semboyan yang dicanangkan Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan luar negeri yaitu *All Direction Foreign Policy* serta faham *A Million Friends Zero Enemy*, maka posisi Israel pun dianggap sebagai partner dalam perpolitikan luar negeri meskipun hal ini tidak terkait dengan kebijakan kerjasama diplomatic.

2. Dicatatnya data perdagangan Indonesia – Israel.

Sepanjang sejarah hubungan Indonesia – Israel terutama dalam bidang kerjasama ekonomi perdagangan, baru pada masa Susilo Bambang Yudhoyono lah ada keterbukaan pemerintah yang secara tidak langsung mengakui bahwa memang ada hubungan kerjasama perdagangan antara kedua negara yang dilakukan oleh pihak swasta maupun negara secara langsung melalui pihak negara ketiga. Hal ini bisa dibuktikan dengan terbitnya table neraca perdagangan Indonesia – Israel yang dirilis oleh kementerian perdagangan. Data yang dirilis oleh kementerian perdagangan secara legal bisa dipertanggung jawabkan karena berasal dari lembaga survey negara yakni Badan pusat Statistik Republik Indonesia (BPS).

3. Hubungan dagang pihak swasta menjadi lebih terbuka.

Pihak swasta dalam hal ini yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi bahkan secara terang-terangan melakukan transaksi perdagangan, seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jasindo yang bahkan secara langsung menyatakan membuka kantor dagang di Indonesia sebagai perwakilan Israel (pihak swasta).

#### **D. Faktor Penghambat Hubungan Indonesia - Israel**

Seperti yang sudah penulis uraikan pada bahasan sebelumnya, bahwa perkembangan politik luar negeri Indonesia mencerminkan sikap dan

pendiriannya dalam kancah politik internasional. Khususnya yang berhubungan mengenai perdamaian di Timur Tengah, Indonesia tetap tegas pada sikapnya dalam mendukung kemerdekaan negara Palestina yang berdaulat.

Dalam penerapan politik luar negeri bebas aktif pemerintah menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik ditingkat global maupun regional yang sangat mempengaruhi penekanan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia dirancang untuk mampu mempertemukan kepentingan nasional Indonesia dengan lingkungan internasional yang selalu berubah. Tidak dapat dipungkiri perlunya politik luar negeri yang luwes dan fleksibel untuk menghadapi segala tantangan. Perubahan lingkungan internasional tersebut tidak hanya disebabkan oleh dinamika hubungan antar negara tetapi juga perubahan isu, dan munculnya aktor baru dalam hubungan internasional yang berupa *non-state actors*.

Untuk lebih lanjut mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono akan penulis uraikan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sekarang ini.

### **1. Kepentingan Umum Pemerintah Indonesia**

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Oleh karena itu, tegaknya negara yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke sangat perlu untuk dipelihara. Namun mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, dimana terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan.

Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kepentingan nasional tersebut diaktualisasikan salah satunya dengan pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Politik luar negeri ini dituangkan kedalam program pemerintah, dan pada saat ini, kebijakan luar negeri Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet

Indonesia bersatu (2004-2009), yang konsisten diabdikan bagi kepentingan nasional.<sup>72</sup>

## **2. Dukungan Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina**

Dalam kerangka upaya-upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No.242 (1967) dan No.338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds As-Sharif (Jerusalem) sebagai ibukotanya serta prinsip “*land for peace*”. Indonesia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan baik oleh PBB maupun OKI, termasuk diantaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), serta Peta Jalan Perdamaian (*Road Map*) gagasan quartet AS, Russia, PBB dan UE yang diharapkan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Indonesia mendukung prakarsa *Quartet* (AS-Rusia-UE dan PBB) dan mengharapkan kedua negara dapat melaksanakan isi Peta Jalan Perdamaian secara baik sehingga konflik Palestina – Israel yang telah berlangsung lebih

---

<sup>72</sup> [http://www.kemlu.go.id/?category\\_id=27](http://www.kemlu.go.id/?category_id=27), (diakses 28 Maret 2013)



dari setengah abad dapat terselesaikan dan kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai.

Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung senantiasa menyambut baik upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB maupun OKI, termasuk di antaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999) serta “Road Map for Peace” yang diprakarsai oleh Kwartet (AS, Russia, PBB dan Uni Eropa) sehingga tercapai pembentukan negara Palestina yang merdeka. Indonesia mengharap negara-negara pemrakarsa *Road Map* untuk terus mengupayakan agar *Road Map* tersebut dilaksanakan oleh kedua negara, Palestina-Israel.

Dalam rangka upaya mediasi penyelesaian konflik Palestina-Israel, Indonesia mempertimbangkan untuk tidak hanya berbicara dengan Palestina saja, namun juga dengan Israel dalam kapasitas informal dan *low profile*. Dengan demikian, maka pertemuan informal Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Israel yang berlangsung di sela-sela Pertemuan Sidang PBB di New York bulan September 2005 lalu dilaksanakan dalam konteks ini. Pertemuan dengan Israel tersebut tidak berarti mengindikasikan adanya suatu pengakuan diplomatik terhadap negara Israel. Pertemuan tersebut berlangsung dengan sepengetahuan pihak Palestina dan dimaksudkan untuk memajukan kepentingan Palestina.

Dalam keterangan pers Menteri Luar Negeri Hassan Wirayudha mengenai Agenda Kunjungan ke Amerika Serikat dalam rangka Menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum PBB, 16 September 2005;

saya memang telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Syalom secara informal dalam konteks yang Bapak Presiden baru saja jelaskan. Dalam konteks besar adalah keperluan kita untuk membantu perjuangan bangsa Palestina, termasuk kita berperan dalam proses perdamaian. Ketika kita menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika, Deputy Perdana Menteri Palestina, Nabil Sa'ad bertemu dengan Bapak Presiden dan menyampaikan harapan dari Presiden Palestina, agar Indonesia menunjuk special envoy, utusan khusus untuk perdamaian Palestina. Kemudian ketika pada kesempatan lain, di Qatar dua bulan lalu saya hadir dalam ... summit, saya juga mengadakan pertemuan juga dengan Presiden Mahmud Abbas. Beliau juga menyampaikan harapannya, Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia layaknya dan diharapkan memainkan peranan penting. Dalam konteks ini tentunya, itu yang tadi sudah kita, sampaikan Bapak Presiden sampaikan, ada keperluan kita. Kalau kita ingin berperan untuk ikut mendorong proses damai, maka terdapat keperluan untuk memastikan sejauh mana pihak lain dapat menerima ..., dalam konteks itulah kami bertemu, dan memang harapan dari pihak Israel juga kuat untuk Indonesia berperan.<sup>73</sup>

Jadi seperti juga diberitakan di surat kabar , garis keputusan besarnya yaitu upaya Indonesia untuk ikut membantu proses damai, kearah terjadinya suatu negara Palestina merdeka, hidup secara berdampingan secara aman dan

---

<sup>73</sup> Dalam Biro Pers dan Media, Rumah Tangga Kepresidenan, [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), (diakses 28 Maret 2013)

damai dengan Israel.

Ketika terjadi Agresi militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina, SBY dengan tegas mengecam tindakan Israel dan sebaliknya memberikan dukungan moral dan financial terhadap Palestina. Selain mengecam tindakan Israel tersebut, SBY juga ikut berperan aktif menghimbau Negara-negara diDunia untuk mendesak Israel menghentikan serangannya dengan menuliskan surat kepada kepala negara dari negara sahabat. Selain itu SBY juga menghubungi SekJen PBB terkait agresi Israel ini.<sup>74</sup>

### **3. Faktor Tekanan Dalam Negeri**

Pada bab sebelumnya, penulis sudah menjelaskan bahwa politik luar negeri atau kebijakan luar negeri setidaknya dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara dimana sebuah kebijakan luar negeri menjadi sebuah komitmen yang tegas. Mengingat dinamika politik internasional selalu berubah-ubah, maka daripada itu sebuah kebijakan luar negeri suatu negara harus bisa menyajikan konsistensinya dalam setiap kebijakan.

Keterkaitan antara perkembangan di kawasan Timur Tengah, khususnya yang menyangkut proses perdamaian Arab-Israel dan masalah kemungkinan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Israel, tampaknya

---

<sup>74</sup> <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-sikap-sby-hadapi-kekejaman-israel-terhadap-palestina/tulis-surat-ke-seluruh-pemimpin-dunia.html> ( diakses 10 Januari 2015)

menjadi dua hal yang sulit untuk dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.<sup>75</sup>

Menurut Prof. Dr. Juwono Sudarsono terdapat dua masalah esensial di Timur Tengah, yaitu masalah Arab-Israel yang belum tentu berkaitan dengan masalah Palestina dan apa yang disebut sebagai inti masalah Timur Tengah yaitu masalah Palestina – Israel. Ini berarti bahwa kalau membahas masalah dan proyek konperensi internasional mengenai Timur Tengah yang harus diingat bahwa ada masalah Arab-Israel tersendiri, yang lepas dari masalah Palestina dan ada masalah Israel-Palestina yang merupakan inti persoalan seperti yang sering dikemukakan dalam forum diplomasi.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menaruh perhatian cukup serius terhadap nasib bangsa Palestina secara keseluruhan yang menjadi korban kekejaman penguasa Israel. Salah satu indikasinya adalah penolakan masyarakat (khususnya kalangan Muslim) terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel di satu sisi, serta dukungan masyarakat Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Kompas* (30 Januari 1996). .

<sup>76</sup> Riza Sihbudi dan Achmad Hadi, *Palestina: solidaritas islam dan tata politik dunia baru*, University of California, 2007, hal. 337

Keterkaitan antara perjuangan bangsa Palestina dan masalah pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, menjadi dua hal yang sulit untuk dipisahkan dalam kerangka pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Paling tidak ini tercermin dari salah seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Indonesia, bahwa hubungan bilateral Indonesia – Israel baru dapat dijalin setelah tercapainya perdamaian menyeluruh di Timur Tengah.

Ditingkat masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan mayoritas masyarakat muslim, pada umumnya masih lebih kuat arus yang menolak pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Alasan mereka, selama Israel masih belum bersedia melepaskan penjajahannya atas semua wilayah Timur Tengah pada umumnya dan Palestina pada khususnya maka penentangan terhadap setiap aktivitas politik antara Indonesia dengan Israel akan tetap terus berlanjut. Masyarakat Indonesia juga selalu melakukan aksi-aksi pengecaman atas setiap kejahatan militer Israel terhadap Palestina.

“Masalah-masalah dalam negeri dirasakan mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Masalah-masalah tersebut bersumber dari perbedaan budaya dari rakyat Indonesia dan pembentukan identitas bangsa yang tidak

selesai....”<sup>77</sup>

Perbedaan budaya tersebut tercermin di dalam pembagian elit masyarakat yang memiliki andil dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia.

### **E. Strategi Politik Luar Negeri Indonesia**

Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara penganut mayoritas muslim moderat seharusnya dapat mewakili umat Islam didunia untuk terus melakukan negosiasi terhadap Israel. Meski demikian, ada keterbatasan peranan Indonesia dalam mencari penyelesaian konflik Israel – Palestina. Selama ini Indonesia hanya bisa berperan melalui bantuan kemanusiaan baik yang bersifat formal, dari pemerintah ke pemerintah, maupun yang tidak formal, dari *civil society ke civil society*.

Pertimbangan mendasar, desakan hubungan diplomatik dengan Israel tak selalu mulus. Lebih kerap menuai protes, khususnya dari kalangan ormas-ormas masyarakat muslim Indonesia. Menjadi beberapa alasan penting sekaligus dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia sebelum memutuskan sikap.

*Pertama*, secara konstitusional, keinginan membuka hubungan diplomatik akan tersandung dasar negara, khususnya pembukaan UUD 1945. *Kedua*,

---

<sup>77</sup> Michael Liefer, *Indonesians Foreign Policy*, Allen and Uwin, London Press, 1983, hal. 136

pembukaan diplomatik juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Karena, membuka hubungan diplomatik berarti mengakui eksistensi kolonialisme serta menyakiti perasaan umat Islam sedunia, umat Islam Indonesia khususnya.

*Ketiga*, Israel tidak pernah mau mentaati Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 242 dan 338. Inti kedua resolusi tersebut adalah meminta Israel mundur dari seluruh wilayah yang didudukinya dalam perang tahun 1967. *Keempat*, pembukaan hubungan tidak sejalan dengan prinsip perjuangan Organisasi Konferensi Islam (OKI), dimana Indonesia salah satu anggotanya.

Pemerintah Indonesia tetap pro-aktif mendorong terciptanya perdamaian yang abadi dan adil, dengan tetap berpegang pada prinsip dan konstitusi negara. Perjuangan Indonesia harus memberikan manfaat, bukan saja bagi warga negeri ini, tetapi juga bagi sebanyak mungkin warga dunia.

Dari beberapa alasan tersebut diatas dapat dipahami bagaimana posisi Susilo Bambang Yudhoyono dalam membuat keputusan terkait dengan Israel. Hal itu menyebabkan timbulnya tindakan pemerintah yang seakan-akan menutupi adanya kegiatan ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan Israel melihat betapa sensitifnya setiap isu yang terkait dengan Israel.